

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Dalam Inpres tersebut diwajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam *Good Governance* dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
17. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor 050/Kep.01-Prog/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016;

2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat secara umum;
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pelaksanaan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok **“Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik”**.

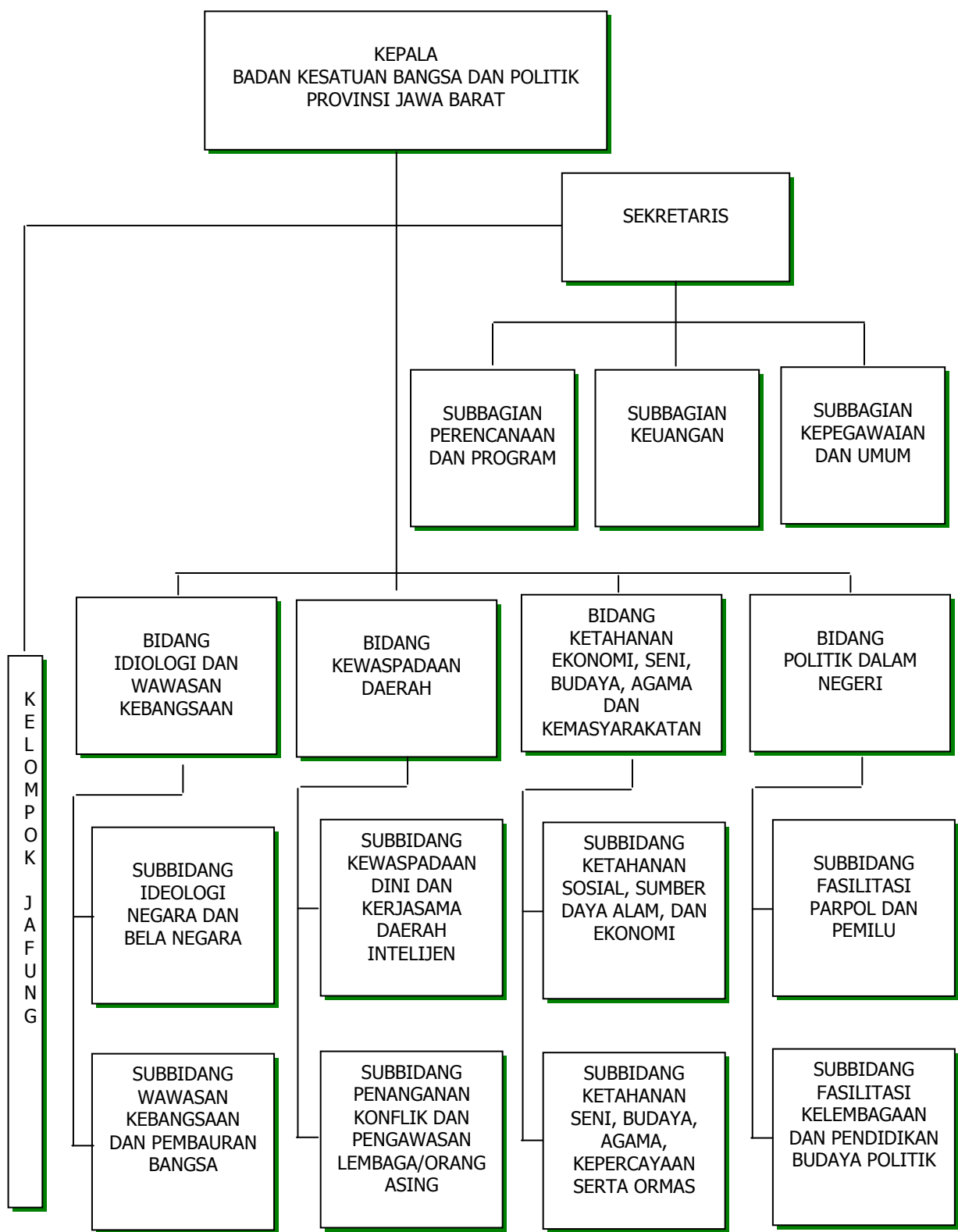
Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga ditetapkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Penyelenggaraan pemberian dukungan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan daerah, bidang ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, serta bidang politik dalam negeri.
3. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di halaman berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Barat



1.5 Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok “Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik” dalam dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, khususnya sebagai akibat arus globalisasi yang demikian deras, akan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat. Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusivitas daerah; dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya faham serta kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualisasi Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elite-nya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman politik masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan politik masyarakat. Keamanan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, serta menurunnya sengketa hasil Pemilu dan Pilkada merupakan beberapa indikator yang menunjukkan tingkat politik masyarakat.

Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penulisan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018, indikator kinerja utama 2014-2018, perjanjian kinerja tahun 2016, dan program, kegiatan, serta anggaran tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tahun 2016, analisis perbandingan capaian kinerja tahun 2016, dan realisasi anggaran tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2013 - 2018

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2013-2018. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, khususnya di bidang kasatuan bangsa dan politik.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Garis besar Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat adalah **“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dan Demokratis”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut menjadi suatu hal yang konkrit maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan idiologi negara dan cinta tanah air;
- Misi Kedua : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusivitas di daerah;

Misi Ketiga : Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan sosial kemasyarakatan;

Misi Keempat : Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat;

2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya pengamalan masyarakat Jawa Barat terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama, dan kemasyarakatan di Jawa Barat.
- 4) Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Jawa Barat yang demokratis, sehat, dan santun.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara, dengan indikator sasaran :
 1. Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat.
 2. Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan.
- 2) Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan, dengan indikator sasaran :
 1. Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat.
 2. Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif, dengan indikator sasaran:
 1. Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* konflik terkait kerukunan antar umat beragama.

2. Jumlah Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat.
- 4) Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasaran :
 1. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat.
 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada.
 3. Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat.

3. Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan idiologi bangsa.
- 2) Peningkatan cinta tanah air.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penyelesaian konflik di daerah.
- 4) Meningkatkan pemantauan kualitas keamanan di daerah.
- 5) Penguatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- 6) Penguatan kelembagaan Ormas.
- 7) Peningkatan fungsi Partai Politik dalam pendidikan politik.
- 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.
- 9) Meningkatkan pendidikan dan budaya politik masyarakat.
- 10) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama infra dan supra struktur politik di Jawa Barat.

b. Program

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013-2018 :

- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 2) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 3) Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 4) Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- 6) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 8) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.
- 9) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2013-2018 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2013-2018
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pengamalan masyarakat Jawa Barat terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela Negara.	1. Tingkat keberhasilan pencapaian zero growth perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tingkat keberhasilan pencapaian zero growth kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	3. Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	30%	35%	40%	45%	50%
			4. Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	6%	18%	29%	47%	59%

3	Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kemasyarakatan di Jawa Barat.	Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif	5. Tingkat keberhasilan pencapaian zero growth konflik terkait kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Jumlah Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat	413	512	580	640	700
4	Terwujudnya kehidupan politik masyarakat Jawa Barat yang demokratis, sehat dan santun.	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat.	7. Indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat	66	67	71	72	73
			8. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	60%	72%	-	70%	73%
			9. Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat.	50%	75%	-	66,7%	70%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perwujudan tersebut hanya dapat terjadi dengan pencapaian target kinerja tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Di dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 telah ditetapkan target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2016
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap idiologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	1. Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat	100%
		2. Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan	100%

2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan	3. Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	40
		4. Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	29
3	Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif	5. Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> konflik terkait kerukunan antar umat beragama	100%
		6. Jumlah Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat	580
4	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	7. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	71
		8. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	-
		9. Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat	-

Program	Anggaran
1. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 4.223.770.000,00
2. Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp. 4.395.084.000,00

2.4 Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2016

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat telah menyusun program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Program, kegiatan, dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Adapun program, kegiatan, dan anggaran untuk setiap kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
3. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan anggaran setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - (1) Penguatan Peran dan Fungsi Forum-Forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 369.200.000,00;
 - (2) Rapat Kerja Bidang Kesbangpol, dengan anggaran sebesar Rp. 518.230.000,00;
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat, yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
 - (1) Peningkatan Pendidikan Politik bagi Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 668.220.000,00;
 - (2) Pelayanan/Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel dalam Pemilukada, dengan anggaran sebesar Rp. 588.575.000,00;
 - (3) Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 735.600.000,00;
 - (4) Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda, dengan anggaran sebesar Rp. 376.800.000,00;
 - (5) Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 731.980.000,00;
 - (6) Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda, dengan anggaran sebesar Rp. 702.655.000,00;
 - (7) Pemantapan Ideologi Bangsa, dengan anggaran sebesar Rp. 419.940.000,00;
- 3) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat tahun 2016, dengan anggaran sebesar Rp. 739.950.000,00;
 - (2) Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 644.580.000,00;
 - (3) Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 447.499.000,00;
 - (4) Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 443.350.000,00;
 - (5) Forum Komunikasi dan Kerja Sama antar Umat Beragama, dengan anggaran sebesar Rp. 430.400.000,00;
 - (6) Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 367.225.000,00;
 - (7) Penguatan Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 736.200.000,00;
 - (8) Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 585.880.000,00;
- 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 663.930.000,00;
 - 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol Prov. Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 2.289.196.000,00;
 - 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol, dengan anggaran sebesar Rp. 545.000.000,00;
 - (2) Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 372.500.000,00;
 - 7) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol Prov. Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 933.278.000,00;

- 8) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Penatausahaan Keuangan Bakesbangpol, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00;
- 9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan, yaitu Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan internal Bakesbangpol, dengan anggaran sebesar Rp. 101.327.000,00;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2016, telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3. Sasaran Strategis I : **Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap idiologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara.**

Tingkat pencapaian sasaran strategis I di atas diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu: Tingkat keberhasilan *zero growth* perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat dan Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan. Indikator Tingkat keberhasilan *zero growth* perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat diukur dengan membandingkan jumlah kelompok radikal di Jawa Barat pada tahun 2016 dengan tahun 2015. *Zero growth* diartikan bahwa jumlah kelompok radikal pada tahun 2016 kurang atau sama dengan jumlah kelompok radikal pada tahun 2015.

Indikator Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan diukur dengan membandingkan jumlah kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan di Jawa Barat pada tahun 2016 dengan tahun 2015. *Zero growth* diartikan bahwa jumlah kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan pada tahun 2016 kurang atau sama dengan kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan pada tahun 2015.

Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela Negara.	1.	Tingkat keberhasilan <i>zero growth</i> perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat	100%	100%	100%
	2.	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan	100%	100%	100%

Kedua indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang pertama ini menunjukkan pencapaian 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perkembangan kelompok radikal dan jumlah kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antara golongan di Jawa Barat pada tahun 2016 tidak lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait sasaran strategis I ini telah cukup efektif untuk mencapai indikator kinerja yang ditargetkan. Pada tahun 2016 kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis I ini, yang telah dilaksanakan adalah penyelenggaraan pendidikan bela negara bagi generasi muda di Jawa Barat yang diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan pada masyarakat di Jawa Barat. Kegiatan lainnya adalah Penguatan Wawasan Kebangsaan melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di Jawa Barat. Selain itu juga terlaksananya kegiatan Pemantapan Ideologi Bangsa dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang ideologi bangsa terhadap 360 orang peserta dari generasi muda dan kegiatan Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat sesuai tata nilai dan etika Pancasila. Dari evaluasi yang dilakukan, tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

4. Sasaran Strategis II : **Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan**

Tingkat pencapaian sasaran strategis II di atas diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu: persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat dan persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat. Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan	1.	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	40	40	100%
	2.	Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	29	29	100%

Kedua indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis II ini menunjukkan pencapaian 100%. Sama seperti pada sasaran strategis yang pertama, pencapaian ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan terkait dengan sasaran strategis II ini juga telah cukup efektif untuk mencapai indikator kinerja yang ditargetkan. Kegiatan tersebut khususnya adalah Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat serta kegiatan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat, dimana kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Untuk mendukung sasaran yang kedua ini juga telah dilakukan kegiatan Penguatan Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat. Dalam kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi dan bhakti sosial diantara dua daerah/kelompok masyarakat yang bertikai di Jawa Barat. Kegiatan lainnya adalah Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat. Dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi penguatan kewaspadaan dan deteksi dini di Jawa Barat sebanyak 7 angkatan serta talkshow di televisi. Pada tahapan pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan ini telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

- Sasaran Strategis III : **Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif**

Tingkat pencapaian sasaran strategis III di atas diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu: Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* konflik terkait kerukunan antar umat beragama dan Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Jawa Barat melalui Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Indikator *zero growth* konflik terkait kerukunan antar umat beragama diukur dengan membandingkan jumlah konflik terkait kerukunan antar umat beragama yang terjadi pada tahun 2016 dengan tahun 2015. *Zero growth* berarti bahwa jumlah konflik terkait kerukunan antar umat beragama yang terjadi pada tahun 2016 sama atau lebih sedikit dengan yang terjadi tahun 2015. Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif	1.	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> konflik terkait kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%
	2.	Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Jawa Barat	580	582	100,3%

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis III tersebut, pada tahun 2016 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya Pemberdayaan Ormas yaitu kegiatan Jambore Ormas, 5 kali *Focus Group Discussion*, 1 kali pembuatan film dokumenter, ditambah dengan kegiatan dalam anggaran perubahan berupa gelar pasukan dalam rangka Hari Bela Negara, pelantikan pengurus Forum Ormas dan penyelesaian legalitas Forum Ormas Berbadan Hukum Indonesia. Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. *Outcome* kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan fungsi Ormas sebagai mitra kerja pemerintah. Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai cukup efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang ketiga ini. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian kedua indikator kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian sebesar 100%.

6. Sasaran Strategis IV : **Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat**

Tingkat pencapaian sasaran strategis IV di atas diukur dengan tiga indikator kinerja, yaitu: Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat; persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada; dan persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat. Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	1.	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	71	NA	-
	2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	-	NA	-
	3.	Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat	-	NA	-

Pada Penetapan Kinerja Tahun 2016, pada sasaran strategis IV ini ditetapkan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat dengan target 71 poin. Namun sampai LKIP ini disusun, BPS belum *me-release* Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016, sehingga pencapaian indikator kinerja ini belum dapat disampaikan. Indikator kinerja yang kedua adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada, yang pada tahun 2016 tidak ditargetkan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilukada di wilayah Jawa Barat.

Namun, walau tidak ada pelaksanaan Pemilukada di wilayah Jawa Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tetap melakukan sosialisasi dan desiminasi terhadap seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, khususnya dalam rangka pencerahan hak-hak politik masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat Jawa Barat agar menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa kesadaran dan pendidikan politik yang baik berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilukada dan terhadap hasil Pemilukada.

3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu antara capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja tahun 2015. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja tahun 2016, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun 2016
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Capaian 2016
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela Negara	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat	100%	100%
		Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan	100%	100%
2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	100%	100%
		Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif	Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> konflik terkait kerukunan antar umat beragama	100%	100%
		Jumlah Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat	100%	100%
4	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	102.1%	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada	85%	-
		Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pilukada di Jawa Barat	100%	-

Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 merupakan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Barat. Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa dari sembilan indikator kinerja pada tahun 2015 telah menunjukkan pencapaian yang maksimal. Untuk indikator kinerja yang diukur pada tahun 2015 dan 2016 terlihat bahwa pencapaian tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016. Hal ini terlihat pada indikator kinerja partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada dimana tahun 2015 capaiannya 85%. Serta persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat, dimana tahun 2015 capaiannya sebesar 100%. Namun secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan.

Di samping itu, apabila dilakukan perbandingan pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 secara umum mampu mempertahankan kinerja tahun 2015, yang tergolong sangat baik.

Selain membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja tahun 2015, juga dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.6. Perbandingan ini perlu dilakukan untuk melihat potensi pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dengan mengacu pada pencapaian indikator kinerja tahun 2016.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016
Dengan Target Jangka Menengah (Tahun 2018)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2018
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	1. Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat	100%	100%
		2. Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan	100%	100%
2	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial	3. Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	40%	50%
		4. Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	29%	59%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2018
	masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan			
3	Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif	5. Tingkat keberhasilan pencapaian <i>zero growth</i> konflik terkait kerukunan antar umat beragama	100%	100%
		6. Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Jawa Barat	580	700
4	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	7. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	NA	73
		8. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	NA	75%
		9. Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat.	NA	70%

Dari Tabel 3.6 tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 bahkan ada yang telah mencapai target akhir Renstra. Namun secara umum, indikator kinerja masih dalam proses memenuhi target yang ditargetkan oleh Renstra sampai dengan target jangka menengah (tahun 2018). Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2016, khususnya sejumlah indikator kinerja yang telah mencapai target jangka menengah, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah yaitu tahun 2018 akan dapat dicapai. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan program dan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, selain kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator-indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 24.275.063.039,00. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 14.513.515.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.761.548.039,00. Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penguatan Peran dan Fungsi Forum-Forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jabar	369.200.000	356.060.000	96,44%
2	Rapat Kerja Bidang Kesbangpol	518.230.000	494.663.970	95,45%
3	Peningkatan Pendidikan Politik bagi Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat	668.220.000	584.890.803	87,53%
4	Pelayanan/Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel dalam Pemilukada	588.575.000	535.568.200	90,99%
5	Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Jawa Barat	735.600.000	674.829.561	91,74%
6	Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Bagi Generasi Muda	376.800.000	371.125.000	98,49%
7	Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat	731.980.000	715.445.000	97,74%
8	Pendidikan Bela Negara Bagi Generasi Muda	702.655.000	653.124.800	92,95%
9	Pemantapan Ideologi Bangsa	419.940.000	416.940.000	99,29%
10	Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat Tahun 2016	739.950.000	705.845.000	95,39%
11	Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat	644.580.000	490.022.000	76,02%
12	Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat	447.499.000	284.023.500	63,47%
13	Pemberdayaan ormas di Jawa Barat	443.350.000	430.851.000	97,18%
14	Komunikasi dan Kerjasama Antar umat Beragama	430.400.000	422.810.000	98,24%
15	Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat	367.225.000	365.153.450	99,44%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
16	Penguatan Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat	736.200.000	720.565.000	97,88%
17	Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat	585.880.000	539.522.650	92,09%
18	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bakesbangpol	663.930.000	358.925.500	54,06%
19	Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol	2.289.196.000	2.211.630.152	96,61%
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol	545.000.000	518.608.250	95,16%
21	Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Jawa Barat	372.500.000	267.374.000	71,78%
22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol	935.278.000	875.004.321	91,63%
23	Penatausahaan Keuangan Bakesbangpol	100.000.000	96.583.600	96,58%
24	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol	101.327.000	95.879.300	94,62%
Jumlah		14.513.515.000	13.167.445.057	90,73%

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2016
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja tidak langsung	9.761.548.039	9.432.190.995	96,63%

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 24.275.063.039,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 14.513.515.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.761.548.039,00. Penyerapan anggaran tersebut masing-masing adalah Rp.

13.167.445.057,00 atau 90,73% untuk Belanja Langsung dan sebesar Rp. 9.432.190.995,00 atau 96,63% untuk Belanja Tidak Langsung. Dengan demikian, total penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 22.599.636.052,00 atau 93,09%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung termasuk baik.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat secara umum telah berhasil menyelenggarakan program dan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam RKT tahun 2016. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

Realisasi anggaran belanja langsung pada setiap kegiatan dan hasil setiap kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi Forum-Forum Mitra Strategi Bakesbangpol Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 369.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 356.060.000,00 dengan *output* kegiatan adalah terbangunnya Sinkronisasi, Koordinasi dan Komunikasi Mitra-Mitra Kesbangpol se Jawa Barat serta meningkatnya Orientasi Forum Mitra Kesbangpol melalui penyelenggaraan 1 kali Mukerda yang diikuti oleh 60 orang pengurus Forum Mitra, 3 kali *Focus Group Discussion*, 7 kali roadshow dan 1 kali orientasi Forum Mitra Kesbangpol. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya sinkronisasi koordinasi dan Komunikasi Mitra-Mitra Kesbangpol se Jawa Barat.
2. **Kegiatan Rapat Kerja Bidang Kesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 518.230.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 494.663.970,00 dengan *output* Kegiatan adalah terbangunnya sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi serta orientasi bidang kesbangpol se Jawa Barat melalui 3 kali rakor bidang kesbangpol dan 1 kali orientasi bidang Kesbangpol ke Provinsi lain. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya tata hubungan kerja antara Provinsi dan Kab/Kota Bidang Kesbangpol se Jawa Barat.
3. **Kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik bagi Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 668.200.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 584.890.803,00 dengan *output* Kegiatan adalah meningkatnya etika budaya dan etika politik terhadap pelajar dan mahasiswa melalui 7 kali sosialisasi pendidikan etika dan budaya politik. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya karakter etika budaya politik demokrasi madani bagi pelajar dan mahasiswa.

4. **Kegiatan Pelayanan/Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel dalam Pemilukada.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 558.575.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 535.568.200,00 dengan *output* Kegiatan adalah meningkatnya pelayanan dan pemahaman tentang pendidikan politik serta hak-hak kaum difabel melalui 5 kali sosialisasi. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya mediasi, advokasi dan lokakarya politik bagi kaum difabel di Jawa Barat.
5. **Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 735.600.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 674.829.561,00 dengan *Output* Kegiatan adalah meningkatnya kualitas demokrasi madani melalui 7 kali studium general/sosialisasi dan 1 kali talkshow di televisi. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya karakter etika budaya politik demokrasi madani bagi elemen masyarakat.
6. **Kegiatan Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Bagi Generasi Muda.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 376.800.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.125.000,00 dengan *Output* Kegiatan adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Jawa Barat sesuai tata nilai dan etika Pancasila melalui 6 kali sosialisasi dan 1 kali talkshow di televisi. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya ketahanan nilai-nilai dan etika kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
7. **Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Kohesi Budaya Lokal Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 731.980.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 715.445.000,00 dengan *output* Kegiatan adalah meningkatnya wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta pemahaman budaya lokal melalui 4 kali sosialisasi bagi 400 tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan 4 kali pentas seni kebangsaan. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai falsafah Bhinneka Tunggal Ika.
8. **Kegiatan Pendidika Bela Negara bagi Generasi Muda.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 702.655.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 653.124.800,00 dengan *Output* Kegiatan adalah meningkatnya pemahaman bela negara di kalangan generasi muda melalui 12 kali sosialisasi dan 1 kali pembuatan film dokumenter. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman bela negara di kalangan generasi muda.

9. **Kegiatan Pemantapan Ideologi Bangsa.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 419.940.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 416.940.000,00 dengan *Output* Kegiatan meningkatnya pemahaman ideologi bangsa melalui sosialisasi di 6 kecamatan bagi 360 orang peserta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dan 1 kali talkshow di televisi. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. **Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat tahun 2016.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 739.950.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 705.845.000,00 dengan *Output* Kegiatan meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika melalui 3 kali sosialisasi bagi 600 orang tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan 2 kali FGD. *Outcome* Kegiatan adalah berkurangnya penyalahgunaan narkotika di Jawa Barat.
11. **Kegiatan Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 664.580.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 490.022.000,00 dengan *Output* kegiatan adalah meningkatnya pengawasan dan deteksi dini keberadaan serta kegiatan orang asing, TKA, NGO, dan orang asing lainnya melalui 7 kali sosialisasi bagi 420 orang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, 4 kali FGD di 4 Wilayah, 1 kali talkshow di Jawa Barat, 1 kali pembuatan film dokumenter, dan 6 bulan/kali pemantauan dan monitoring terhadap orang asing. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya situasi dan kondisi daerah yg kondusif dari dampak keberadaan dan kegiatan orang asing, TKA, NGO, dan orang asing lainnya di Jawa Barat.
12. **Kegiatan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 447.499.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 284.023.500,00 dengan *output* Kegiatan adalah meningkatnya penanganan konflik sosial dan komunikasi tim terpadu melalui 4 kali rakor timdu kab/kota, 4 kali rakor timdu provinsi, 2 kali talkshow di televisi, 2 kali talkshow di radio, 4 kali pemantauan dan monitoring serta 4 kali pelaporan dan evaluasi. *Outcome* kegiatan adalah terwujudnya kerjasama tim terpadu melalui penyamaan visi misi persepsi dan kesatuan langkah dalam menyikapi perkembangan situasi sosial politik dan keamanan guna mewujudkan kondusifitas daerah.
13. **Kegiatan Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 443.350.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 430.851.000,00 dengan *output* kegiatan adalah

meningkatnya peran dan fungsi ormas sebagai mitra kerja pemerintah melalui 1 kali jambore ormas bagi 250 orang pengurus ormas, 1 kali FGD, dan 1 kali pembuatan dokumenter serta 1 kali gelar pasukan, pelantikan pengurus dan legalitas. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya peranan ormas sebagai mitra kerja adalah melaksanakan pembangunan di Jawa Barat.

14. **Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 430.400.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 422.810.000,00 dengan *Output* Kegiatan adalah konsolidasi forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) melalui 2 kali kemah bhakti bagi 200 generasi muda lintas agama, 4 kali FGD, 1 kali Talkshow dan 1 kali Orientasi. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya peran dan fungsi forum kerukunan umat beragama untuk mencegah konflik antar umat beragama guna menciptakan Jawa Barat yang kondusif.
15. **Kegiatan Penguatan Pemahaman Kearifan Lokal bagi Pelaku Budaya di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 367.225.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.153.450,00 dengan *output* Kegiatan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku terhadap penguatan budaya melalui 3 kali FGD, 1 kali talkshow di televisi, 1 kali penguatan keberadaan sanggar dan 1 kali orientasi. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya pembangunan budaya yang berbasis kearifan lokal.
16. **Kegiatan Penguatan Komunikasi Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Lokal di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 736.200.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 720.565.000,00 dengan *Output* Kegiatan adalah meningkatnya organisasi masyarakat dalam penanganan dan penyelesaian konflik yang berkembang di daerah mealalui 10 kali sosialisasi bagi 600 orang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta 10 kali bakti sosial.
17. **Kegiatan Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 585.880.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.522.650,00 dengan *Output* Kegiatan adalah terciptanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui 7 kali sosialisasi bagi 490 orang tokoh masyarakat, 1 kali talkshow, dan 5 bulan monitoring. *Outcome* Kegiatan adalah terwujudnya kewaspadaan dan deteksi dini dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya permasalahan yang berkembang di masyarakat.
18. **Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bakesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.

670.950.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 358.925.500,00 dengan *output* Kegiatan adalah terselenggaranya kursus-kursus, diklat/jafung, sosialisasi/seminar, lokakarya, rakor bimtek selama 12 bulan, pengadaan ATK dan dekorasi taman selama 12 bulan, penceramah kerohanian selama 12 bulan, jamuan kerohanian selama 12 bulan, pakaian dinas harian sebanyak 3 paket, dan kontribusi diklat selama 12 bulan. *Outcome* Kegiatan adalah terciptanya manajemen sumber daya aparatur yang berbasis kompetensi dan komprehensif.

19. **Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.289.196.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.211.630.152,00 dengan *Output* Kegiatan adalah terselenggaranya administrasi perkantoran, Penyediaan ATK, benda pos, jasa dokumentasi, dan Publikasi selama 12 bulan, Jasa komunikasi, Listrik dan air selama 12 bulan, belanja cetakan dan Penjilidan 12 bulan, Sewa mesin photocopy selama 1 tahun. *Outcome* Kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan dasar operasional pelaksanaan tupoksi Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat .
20. **Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 545.000.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 518.608.250,00 dengan *Output* kegiatan tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai melalui pengadaan ATK kegiatan sebanyak 1 paket, pengadaan komputer PC, notebook dan printer sebanyak 22 buah/set, Pengadaan sofa dan rak buku sebanyak 11 buah/set, pengadaan radio SSB, Radio HF/FM (Handy Talkie) dan alat pemancar/antene sebanyak 32 buah/set dan pengadaan senjata api sebanyak 1 unit. *Outcome* Kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.
21. **Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bakesbangpol Jawa Barat.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 372.500.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 257.374.000,00 dengan *output* Kegiatan adalah tersusunnya DED pembangunan gedung Kantor Bakesbangpol. *Outcome* Kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana Bakesbangpol Prov Jawa Barat.
22. **Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bakesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 935.278.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 857.004.321,00 dengan *Output* meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol Prov. Jawa Barat dan *Outcome* terlaksananya tupoksi Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat melalui

dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dengan jumlah yang mencukupi dan dengan kualitas yang baik.

23. **Kegiatan Penatausahaan Keuangan Bakesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp.96.583.600,00 dengan *Output* kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan yang akurat dan tepat waktu melalui 1 kali studi komparatif pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta 8 bulan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan kegiatan Bakesbangpol. *Outcome* kegiatan adalah terjaminnya pengelolaan keuangan Bakesbangpol yang transparan dan akuntabel.
24. **Kegiatan Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol.** Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.327.000,00, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.879.300,00 dengan *Output* kegiatan terselenggaranya penyusunan Renja sebanyak 4 buku, RKA dan DPA 30 buku, LKPJ dan LPPD sebanyak 8 buku, RKT sebanyak 8 buku, Laporan dan evaluasi kegiatan Bakesbangpol selama 6 bulan. *Outcome* kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja Bakesbangpol Prov Jawa Barat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari sembilan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016, sebanyak 7 indikator kinerja telah berhasil dicapai dengan baik, sedangkan 2 indikator kinerja yaitu Indeks Demokrasi Indonesia belum diumumkan oleh BPS, sedangkan indikator kinerja partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada dan penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat tidak ditargetkan pada tahun 2016 dikarenakan tidak adanya penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilukada di wilayah Jawa Barat. Dimana pencapaian untuk partisipasi masyarakat pada tahun 2015 sebesar 85%, ditargetkan 72% dan dicapai sebesar 61%. Sedangkan indikator kinerja penurunan sengketa pada Pemilu dan Pemilukada di tahun 2015 ditargetkan sebesar 75%. Dengan demikian, secara umum target pencapaian sasaran strategis pada tahun 2016 telah dapat dicapai dengan baik.

Secara ringkas, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara.”, dengan indikator kinerja Tingkat keberhasilan *zero growth* perkembangan kelompok radikal di Jawa Barat dan Tingkat keberhasilan pencapaian *zero growth* kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan”, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat dan Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif”, dengan indikator sasaran keberhasilan pencapaian *zero growth* konflik terkait kerukunan antar umat beragama dan Persentase Ormas yang berperan secara aktif dalam pembangunan Jawa Barat, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

4. Sasaran strategis “Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat”, dengan indikator sasaran Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat; Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada; dan Persentase penurunan sengketa Pemilu atau Pemilukada di Jawa Barat, untuk tahun 2016, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tidak menargetkan capaian indikator tersebut, dengan asumsi bahwa pada tahun 2016, tidak ada pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada di wilayah Jawa Barat. Namun, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tetap berupaya melakukan sosialisasi dan desiminasi dalam rangka peningkatan pendidikan politik serta pemahaman terhadap hak-hak politik seluruh elemen masyarakat. Sedangkan untuk Persentase Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat sampai saat ini belum dapat disampaikan karena belum di-*release* oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dapat dicapai dengan sangat baik. Namun demikian, upaya-upaya untuk pencapaian yang baik tersebut bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang dihadapi pada Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian dari kendala dan hambatan tersebut telah dapat diatasi, namun beberapa kendala dan hambatan masih membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 antara lain adalah:

1. Sebagai gambaran di tahun yang lalu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah masih tergolong sedang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada tahun 2015 ditargetkan sebesar 72%, namun pencapaiannya pada Pemilukada di 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat hanya 61%. Gambaran ini yang menjadikan Bakesbangpol untuk selalu melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik serta dalam rangka menurunkan jumlah sengketa dalam Pemilu atau Pemilukada di tahun-tahun mendatang.
2. Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.
3. Meningkatnya potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas

dan imigran gelap. Penyebabnya antara lain adalah perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi informasi, budaya, dan ekonomi yang memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional.

4. Lemahnya sistem pelaporan dari kabupaten dan kota ke provinsi tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
5. Adanya perbedaan cara pengukuran pencapaian indikator kinerja antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan pelaksanaan kegiatan. Pada Renstra, indikator kinerja diukur dalam bentuk persentase, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja diukur dalam bentuk jumlah kegiatan atau jumlah peserta.

4.3 Langkah Antisipatif dan Strategi Pemecahan Masalah

Dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, baik secara lokal, nasional, dan global seperti mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), telah mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Jawa Barat. Sejumlah pengaruh positif dari kondisi ini juga diiringi dengan pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusifitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam aspek degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya paham-paham dan gerakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti gerakan GAFATAR, LGBT, serta kelompok-kelompok radikal.

Pada akhir tahun 2016, terjadi konflik antar organisasi kemasyarakatan yang berskala besar, yaitu antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang terus berlangsung sampai dengan awal tahun 2017. Kedua ormas ini termasuk ormas besar yang memiliki massa yang besar pula, sehingga perlu penanganan yang intensif serta telah menyita perhatian khalayak umum. Perlu kembali ditingkatkan pemahaman terhadap organisasi kemasyarakatan, bahwa peran dan fungsi serta keberadaan mereka sebagai mitra kerja pemerintah dalam mencapai pembangunan Jawa Barat.

Selain itu, maraknya kejadian terorisme di wilayah Jawa Barat, sehingga Jawa Barat diasumsikan sebagai kantong gerakan radikal, memaksa berbagai pihak untuk selalu melakukan tindakan intelejen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah dan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Dalam menghadapi kondisi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dituntut untuk selalu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders*-nya dengan tetap mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mampu mencegah atau mereduksi potensi ancaman tersebut, antara lain seperti :

- 1) Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan sasaran kelompok masyarakat yang berpotensi menyebarkan pendidikan tersebut, sehingga bisa menimbulkan efek bola salju yang akan menjangkau sasaran yang lebih luas. Kelompok sasaran seperti ini antara lain adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok PKK, Karang Taruna, Ketua RT/RW dan guru-guru.
- 2) Pemberdayaan *local wisdom* seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya dalam upaya mencegah atau mengurangi terjadinya konflik sosial.
- 3) Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki perbedaan paham di masyarakat dan kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi.

Selain itu, perkembangan politik dalam negeri selama tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017 memunculkan sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan/ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan pemerintahan yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab bidang Kesbangpol menjadi urusan Pemerintahan Umum yang kewenangannya berada pada Presiden dan akan dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota dengan dibantu oleh instansi vertikal. Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat sebagai OPD yang secara langsung berkaitan dengan perubahan ini dituntut untuk menyusun langkah-langkah antisipasi dan persiapan yang dinilai perlu untuk menghadapi perubahan tersebut. Koordinasi dan komunikasi, baik secara vertikal dengan Ditjen Kesbangpol Kemendagri dan Kantor/Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, maupun secara horizontal dengan Setda Provinsi Jawa Barat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan secara intensif.

Perkembangan lain adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Dimana, berdasarkan peraturan tersebut dititikberatkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, Gubernur hanya sebatas menerima laporan saja terkait

keberadaan Ormas yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, 12, 13, dan Pasal 15.

Sejak diterbitkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XI/2013 tgl 23-12-2014 dan Putusan MK No. 3/PUU-XI/2014 tgl 23-12-2014 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, dimana dalam putusan MK tersebut dinyatakan secara tegas beberapa Pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU No 17 Th 2013 ttg Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan adanya putusan MK tersebut maka Gubernur yang semula berwenang memberikan SKT, telah kehilangan wewenangnya utk memberikan SKT. Artinya Gubernur sudah tidak berwenang lagi untuk memberikan SKT kepada ormas tidak berbadan hukum yg memiliki lingkup provinsi. Ketidakberwenangan Gubernur dalam menerbitkan SKT tersebut, ditegaskan kembali dlm Pasal 6 dan Pasal 7 PP 58 Th 2016 ttg Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dimana ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT dari Menteri Dalam Negeri. Dalam keterangan PP tersebut Wewenang Gubernur hanya terbatas kepada menerima laporan keberadaan Kepengurusan dari ormas ybs yang laporannya disertai dengan SKT yang diterbitkan oleh Mendagri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

- Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas tdk berbadan hukum merupakan wewenang Mendagri.
- Wewenang Gubernur hanya terbatas menerima laporan saja terkait keberadaan ormas ybs.

Adapun kewenangan yg masih melekat pada Gubernur, yaitu :

1. Melakukan pengawasan eksternal terhadap ormas
2. Menerima pengaduan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan eksternal oleh masyarakat terhadap ormas.

Selain hal itu, terdapat ketentuan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan wewenang gubernur dalam menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 60 dan Pasal 67 UU 17/2013. pasal 60 memberikan wewenang kepada Gubernur untuk menjatuhkan sanksi administratif (memberikan peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan SKT) manakala ormas melanggar kewajiban (pasal 21) dan larangan (pasal 59).

Dalam implementasinya, perlu lebih dikembangkan lagi koordinasi antar instansi Kesbangpol se Jawa Barat dengan melakukan kajian-kajian dan pendalaman secara komprehensif, sehingga dihasilkan telaahan dan tinjauan yuridis mengenai produk hukum tersebut.

Dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2013-2018. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran. Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Demikian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tahun 2016 ini disusun, untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Bandung, Pebruari 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

R. RUDDY GANDAKUSUMAH, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630820 198903 1 008